

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengembangan pusat pertumbuhan di Kabupaten Blora sangat penting dalam upaya pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan wilayah. Arah pengembangan pusat pertumbuhan di Kabupaten Blora ini ditentukan berdasarkan hasil dari analisis pusat perkotaan, penentuan hierarki pusat pertumbuhan, potensial ekonomi wilayah tersebut (yang dapat dilihat melalui penggunaan lahan eksisting), dan analisis interaksi antar pusat pertumbuhan dengan daerah di sekitarnya. Hasil analisis deliniasi kawasan perkotaan menggunakan data klasifikasi desa pedesaan dan desa perkotaan dan data GHS-SMOD didapatkan 12 kawasan perkotaan di Kabupaten Blora. Kawasan perkotaan tersebut antara lain Perkotaan Cepu, Perkotaan Blora, Perkotaan Jepon Perkotaan Randublatung, Perkotaan Kunduran, Perkotaan Ngawen, Perkotaan Tunjungan, Perkotaan Jati, Perkotaan Todanan, Perkotaan Banjarejo, Perkotaan Kedungtuban, dan Perkotaan Bogorejo. Dari 12 kawasan perkotaan tersebut kemudian didapatkan 4 hierarki pusat pertumbuhan dengan hierarki I terletak di Perkotaan Cepu dan Perkotaan Blora. Sedangkan pada hierarki II ada Perkotaan Jepon dan Perkotaan Randublatung, pada hierarki III terdapat Perkotaan Kunduran, Perkotaan Ngawen, Perkotaan Tunjungan, Perkotaan Jati, dan Perkotaan Todanan. Perkotaan yang berada di hierarki IV yakni Perkotaan Banjarejo, Perkotaan Kedungtuban, dan Perkotaan Bogorejo.

Penentuan pusat pertumbuhan utama, pusat pertumbuhan kedua, pusat pertumbuhan ketiga dan hinterland dari pusat pusat pertumbuhan tersebut selanjutnya didapat melalui analisis interaksi. Kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan biasanya menjadi tempat distribusi kebutuhan pokok, lokasi pemasaran hasil produksi, pusat pendidikan, serta penyedia lapangan pekerjaan. Kawasan perkotaan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan utama adalah di Perkotaan Cepu yang juga memiliki fungsi sebagai PKW, pusat pertumbuhan kedua adalah Perkotaan Blora yang memiliki fungsi sebagai PKL, dan pusat pertumbuhan ketiga adalah Perkotaan Randublatung yang juga memiliki fungsi sebagai PKL. Sedangkan pada kawasan Perkotaan Jepon, Perkotaan Tunjungan, Perkotaan Ngawen, Perkotaan Kunduran, Perkotaan Jati, dan Perkotaan Todanan lainnya berperan sebagai hinterland dan memiliki fungsi sebagai PPK. Pada Kawasan Perkotaan Banjarejo, Perkotaan Kedungtuban, dan Perkotaan Bogorejo berperan sebagai hinterland dan memiliki fungsi sebagai PPL.

Perumusan arah pengembangan dari pusat pertumbuhan di Kabupaten Blora ini dirumuskan berdasarkan kelengkapan fasilitas yang di analisis melalui analisis skalogram, besaran nilai interaksi antar wilayahnya, serta dengan mempertimbangkan kebijakan dari dokumen perencanaannya. Sebagai Pusat Pertumbuhan Utama, Perkotaan Cepu memiliki arahan pengembangan penguatan industri pertambangan migas dan perdagangan serta pengembangan jaringan transportasi guna mendukung mobilitas penduduk dan barang. Lalu untuk Pusat Pertumbuhan Kedua, yakni Perkotaan Blora memiliki arahan pengembangan pengembangan fungsi administratif pemerintahan, peningkatan layanan sarana pendidikan, serta pengembangan pusat ekonomi lokal. Pusat pertumbuhan Ketiga, yakni Perkotaan Randublatung memiliki pengembangan perkotaan bagian selatan dengan optimalisasi jaringan transportasi serta pengembangan industri pengolahan kayu jati

5.2 Rekomendasi

1. Pada analisis deliniasi kawasan perkotaan, diperlukan studi lanjutan yang lebih luas dengan melibatkan Kabupaten Bojonegoro sebagai wilayah analisis, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai Perkotaan Cepu.
2. Berdasarkan hasil analisis skalogram terdapat perbedaan ketersediaan fasilitas pada antar perkotaan di Kabupaten Blora yang cukup besar, sehingga diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas terutama untuk fasilitas transportasi umum oleh Dinas Perhubungan, fasilitas kesehatan oleh Dinas Kesehatan, dan fasilitas perekonomian dengan mendorong pengembangan industri kecil dan menengah, serta membuka ruang untuk investasi di sektor jasa dan perdagangan oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blora.
3. Berdasarkan analisis interaksi diperlukan penguatan akses Perkotaan Cepu menuju wilayah barat Kabupaten Blora yang sebagian besar merupakan kawasan hutan jati oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Upaya ini penting agar Kawasan perkotaan lain yang berfungsi sebagai *hinterland* di Kabupaten Blora juga dapat terdorong berkembang.
4. Pada penentuan arahan pengembangan, perlu adanya integrasi kebijakan tata ruang yang selaras dengan rencana pembangunan daerah sehingga arah pengembangan pusat pertumbuhan dapat berjalan konsisten dan berkesinambungan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Blora.